

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Alasan Pemilihan Judul**

The Asia Foundation adalah sebuah non Governmental organization yang mempunyai tujuan dan commitment untuk (*build Peaceful, prosperous, just and open-Asia Pacific Region*) yaitu untuk membangun kawasan Asia Pasifik menjadi damai, makmur, adil, dan terbuka. Organisasi ini berdiri sejak tahun 1954. organisasi ini pada mulanya adalah organisasi berkembang yang juga memiliki beragam muatan hubungan internasional. Sampai sekarang ini telah bekerja di dalam 20 negara di Asia dan beberapa kepulauan di pasifik. Organisasi ini telah memiliki 17 kantor-kantor resmi di sepanjang kawasan asia yang meliputi kawasan Asia Selatan, Asia Tenggara dan Asia Barat. <sup>1</sup>

Sebagian besar tujuan dan proyek organisasi ini adalah terletak pada 4 kategori yaitu Reformasi dan Pembangunan Ekonomi, Pemerintahan, Hukum dan *civil society* (termasuk pelatihan pemilihan umum), Hubungan Internasional dan Pemberdayaan perempuan .

Sejak 1955, Asia Foundation telah bermitra dengan berbagai lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta dalam mendukung

---

<sup>1</sup> “*Indonesia Overview*” The Asia Foundation. (Diakses pada hari Jum’at Tanggal 6-November-2009 ) tersedia di: <http://asiafoundation.org/publications/pdf/261>

proses transisi dari negara paskakolonialisme sebuah negara demokratis dengan perekonomian yang dinamis. Melalui kemitraan tersebut, sampai saat ini Asia Foundation terus mendukung prakarsa Indonesia dalam melakukan konsolidasi demokrasi, perbaikan pelayanan pemerintah, dan pengurangan kemiskinan. Di Indonesia selama lebih dari lima dekade Asia Foundation ikut berkontribusi menjawab kebutuhan Indonesia melalui serangkaian program seperti penguatan sistem hukum dan kehakiman, peningkatan reformasi ekonomi, pengentasan kemiskinan, penguatan peran perempuan dalam masyarakat dan politik, penguatan peran masyarakat dalam pemilihan umum yang adil dan terbuka, pengembangan mutu dan kapasitas pendidikan di segala tingkatan, serta dukungan bagi tumbuhnya masyarakat sipil yang kuat dan dinamis. Salah satu jejak langkah Asia Foundation terlihat dalam dukungannya pada upaya organisasi-organisasi Muslim dalam mencapai tujuan-tujuan utama pembangunan di Indonesia.<sup>2</sup>

Sebagai Organisasi yang berasal dari Amerika Serikat tentunya The Asia Foundation juga terkait dengan penyebaran Demokratisasi yang digawangi oleh negara asalnya tersebut. Apasajakah yang telah dilakukan The Asia Foundation dalam rangka penyebaran Demokrasi di Indonesia. Berangkat dari pertanyaan tersebut maka penulis merasa perlu untuk mengangkat judul **“Peran Asia**

---

<sup>2</sup> Ibid

## **Foundation Dalam Demokratisasi Di Indonesia Pada Era Setelah Transisi ”**

sebagai objek penelitian.

### **B. Latar Belakang Masalah**

Pada dekade 90-an muncul kesadaran global bahwa rivalitas antara utara dan Selatan telah menimbulkan krisis berat- sebuah dunia dengan kemiskinan yang merendahkan martabat manusia sistem ekologi yang berada di ambang kehancuran, dan struktur-struktur sosial yang sudah sangat keberatan beban. Kita mulai menyadari bahwa masalah-masalah ini tidak berdiri sendiri. Ini adalah gejala di seluruh dunia yang satu merupakan penyebab sekaligus akibat dari yang lainnya. Masing-masing mencerminkan kegagalan institusional yang penting.<sup>3</sup> Atas dasar kesadaran itulah maka banyak NGO-NGO utara yang tergerak untuk membantu krisis yang terjadi di negara-negara Selatan yang salah satunya adalah The Asia Foundation.

The Asia Foundation memulai programnya di Indonesia pada awal tahun 1955. Program yang utama adalah mendukung berbagai LSM dalam upaya untuk memperkuat basis dan hak-hak politik rakyat sebagai landasan untuk meningkatkan partisipasi mereka.<sup>4</sup> Di Indonesia sendiri runtuhnya rezim orde

---

<sup>3</sup> David Corten. *Menuju Abad 21, Tindakan Sukarela dan Agenda Global*. Penerbit: Yayasan Obor Indonesia Dan Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1993. Hlm.1.

<sup>4</sup> *Hillary datang ,SBY Siaga*. (diakses pada hari Senin 09-11-2009) tersedia di <http://umarsyaifulah.blogdetik.com/tag/asia-foundation/>

baru membawa perubahan terutama dalam peta konfigurasi politik di Indonesia. Momen itu begitu menentukannya sehingga seolah menjadi batas berakhirnya masa kegelapan akan order silam. Segala respon sikap menjadi begitu reaktif setelah melewati masa-masa yang diselimuti oleh *phobia* hantu otoritarianisme itu. Bandul kekuasaan bergeser yang tadinya terpusat begitu dominan di tangan seorang presiden, khawatir akan ingatan kelam masa silam, begitu saja berbalik secara berlawanan di tangan lembaga perwakilan. Tidak hanya itu, dalam ranah sosial-budaya, wacana tentang penguatan masyarakat sipil semakin mengemuka, kebebasan berekspresi, berpendapat makin mendapat tempat karena model pemerintahan yang terpusat dan dominan telah sama sekali ditolak berganti dengan model pemerintahan demokratis. Banyak pengamat yang mengatakan bahwa demokrasi menjadi pilihan yang cukup ideal untuk membenahi berbagai persoalan hukum, politik, ekonomi, dan budaya yang telah demikian korup. Pasca Soeharto merupakan momen untuk berbenah diri terutama dalam memantapkan demokratisasi agar dapat berlangsung sepenuhnya di Indonesia. Para demokrat sering menyebut Indonesia kini sedang berada dalam *track* yang benar selama pembenahan dapat dilakukan secara bertahap namun pasti menjadi untuk negara yang demokratis. Semangat melakukan perubahan, mereformasi pemerintahan dan tatanan sosial merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai tahap transisi menuju demokrasi. Dalam masa ini perangkat-perangkat demokrasi seperti

pengakuan dan penegakan HAM, kebebasan pers, dll sedikit demi sedikit dipersiapkan menuju konsolidasi, hingga demokrasi sepenuhnya. Tahapan ini bergerak secara linear tapi pasti dimana yang pertama menjadi syarat bagi yang selanjutnya. Namun, dimana kini Indonesia sedang berada, masih menjadi pertanyaan yang menyelimuti perdebatan para intelektual. Tidak hanya itu, model demokrasi seperti apa yang sesuai dengan konteks ke-Indonesiaan, apakah demokrasi Pancasila –seperti yang digunakan oleh Soeharto masa silam- atau demokrasi liberal, atau ada model lain yang lebih pas, juga masih dalam perdebatan. Terlepas dari itu, saat dimana Indonesia telah beranjak dari rezim otoriter sudah merupakan sebuah prestasi, setidaknya ia telah membuat masyarakat justru menjadi *euforia* akan orde yang baru.

Jika merujuk lebih jauh ke belakang, beberapa tahun sebelum jatuhnya Soeharto arus demokratisasi sebenarnya secara perlahan sudah mulai menguat. Pada saat itu pula kekuasaan orde baru sedikit demi sedikit mulai melemah. Masyarakat dan para intelektual mulai makin berani melantangkan wacana demokrasi yang lebih substansial, bukan sekadar formalitas dengan mengadakan pemilu *ala* orde baru. Geliat ini sesungguhnya bukan merupakan gerak masyarakat yang sporadis dan terfragmentasi tetapi menjadi momen menuju perubahan besar dalam banyak segi kehidupan. Wacana yang berkembang di kalangan intelektual juga mengalami pergeseran minat yang cukup penting.

Huntington, menyebut geliat demokrasi yang muncul di Indonesia itu sebagai bagian dari arus besar gelombang demokratisasi<sup>5</sup> di negara-negara dunia ketiga dan negara eks-komunis. Peristiwa ini ditandai oleh runtuhnya rezim komunis Rusia dan berakhirnya perang dingin yang sangat berpengaruh merubah geopolitik dunia. Fukuyama menyebut momen itu sebagai titik pijak baru dimana negara-negara dunia mulai memasuki babak baru sejarah dunia. Tidak hanya kapitalisme yang dianggap sebagai ideologi yang telah teruji oleh sejarah karenanya dianggap telah final tetapi juga demokrasi, terutama demokrasi liberal, sebagai konsep negara yang berlaku secara universal. Terbukti dengan jatuhnya negara-negara komunis terutama Rusia.

Gelombang demokratisasi itu secara perlahan namun pasti merubah *style of government* negara-negara dunia menjadi demokratis. Kejatuhan Soeharto merupakan sebuah contoh. Lee kwan yew di Sangapura, perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad, serta Presiden Marcos di Filipina yang otoriter, untuk menyebut beberapa contoh di Asia Tenggara, secara perlahan digantikan oleh sosok pemimpin yang dianggap lebih demokratis. Demikian pula satu per satu negara-negara eks-komunis di Eropa Timur mulai meninggalkan ideologi marxisme dan leninisme. Terkecuali Korea Utara dan Kuba, yang masih

---

<sup>5</sup> Samuel Huntington “ *Gelombang Demokratisasi Ketiga.*” Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997. hlm. 1-3.

mempertahankan ideologi itu meski secara terbata-bata.<sup>6</sup> Indonesia pada saat itu dalam keadaan yang kurang stabil dikarenakan krisis moneter yang melanda kawasan Asia dan juga adanya tuntutan pada pemerintah Orde Baru untuk turun. Akibatnya angka kemiskinan pada dekade 90-an melonjak drastis. Dalam masa kediktatotan Orde Baru banyak juga terjadi pelanggaran HAM disana-sini yang baru muncul ke permukaan ketika Orde itu tumbang. Upaya negara untuk mengendalikan semua aspek kegiatan manusia atas nama pembangunan telah mencekik inovasi, inisiatif manusia dan generasi sumberdaya setempat yang penting bagi kemajuan pembangunan. Padahal salah satu visi pembangunan berpusat-rakyat adalah memperkuat masyarakat sipil untuk memungkinkan rakyat bersatu dan menerapkan kekuatan sosialnya untuk memperbaiki masa depan mereka, ini bisa terjadi dengan peran sebuah pemerintahan yang bertanggung jawab. Rakyat, menurut hak dan kebutuhan, harus sekaligus menjadi Arsitek dan mesin pembangunan.<sup>7</sup> Atas dasar inilah The Asia Foundation sebagai sebuah LSM non-profit yang berkomitmen membangun masyarakat Asia Pasifik yang damai, makmur dan terbuka merasa terpanggil untuk membantu masyarakat

---

<sup>6</sup> Abdil Mughlis “*Studi Indonesia Pasca Soeharto: Dari Otoriterianisme Menuju Demokratisasi.*” (Diakses pada hari Jum’at Tanggal 6-November 2009) tersdia di : [http://www.interseksi.org/publications/essays/articles/studi\\_indonesia\\_pasca\\_suharto.html](http://www.interseksi.org/publications/essays/articles/studi_indonesia_pasca_suharto.html)

<sup>7</sup> David Corten. *Menuju Abad 21, Tindakan Sukarela dan Agenda Global.* Penerbit: Yayasan Obor Indonesia Dan Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1993. Hlm.256.

Indonesia melalui penguatan masyarakat sipil dan berbagai bantuan kepada lembaga-lembaga kemitraannya.

### **C. Pokok Permasalahan :**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis menetapkan pokok permasalahan yang bisa dijadikan sumber penelitian yakni, **“Bagaimana Peran Asia Foundation Dalam Demokratisasi di Indonesia pada Era Setelah Transisi.”**

### **D. Kerangka Pemikiran/Teori yang di gunakan :**

Untuk menjelaskan masalah di atas maka penulis menggunakan konsep konsep sebagai berikut:

#### **1. Konsep LSM lembaga sosial masyarakat**

Konsep LSM atau NGO *“Non-Governmental Organizations, bodies with broad international structure, or goals to be accomplished by influencing governments, and not constituted as political parties.”*<sup>8</sup>

Yaitu “ Badan-badan dengan struktur internasional yang mencapai kepentingannya dengan mempengaruhi pemerintah dan secara konstitusi bukanlah

---

<sup>8</sup> "Non-Governmental Organizations," (Diakses pada hari Jum'at Tanggal 6-November-2009) tersedia di: Microsoft® Encarta® Online Encyclopedia 2009<http://uk.encarta.msn.com> © 1997-2009 Microsoft Corporation. All Rights Reserved.

suatu Partai Politik”. David C Korten menulis sebuah artikel yang membagi organisasi non-pemerintah kedalam tiga Generasi.

1. Generasi pertama merupakan gerakan bantuan peringanan terhadap orang-orang yang terkena kesusahan. Sifatnya kataritatif, dalam bentuk bantuan jasa atau barang. Dengan bantuan ini orang-orang yang ditolong bisa terbebas dari masalah tersebut. Misalnya memberikan makan terhadap masyarakat yang sedang menderita kelaparan, atau membantu mencari sumber-sumber air di daerah yang kekeringan. Persoalan dari organisasi pemerintah generasi ini adalah setelah mereka pergi, maka persoalan yang sama akan kembali dialami oleh masyarakat tersebut.
2. Generasi kedua merupakan gerakan untuk membantu mengembangkan swadaya dari masyarakat yang dibantu. Jadi berbeda dengan organisasi non-pemerintah generasi pertama, pada generasi kedua dikembangkan kesanggupan masyarakat untuk mengatasi kesulitannya sendiri. Misalnya dengan memberi pelatihan beternak dan bercocok tanam bagi masyarakat terpencil sehingga mereka bisa menghasilkan sendiri makanan mereka, kesanggupan untuk mengatasi persoalan sudah mereka miliki. Tapi, persoalanya disini sering bukan masalah teknik tapi masalah politik. Kesulitan yang dihadapi masyarakat seringkali disebabkan oleh hambatan-hambatan yang diciptakan pemerintah yang ada di daerah tersebut, yang

telah bekerjasama dengan pengusaha lokal maupun nasional, bahkan kadang-kadang Global. Akan sulit bagi masyarakat lokal untuk “berkelahi” melawan kekuatan-kekuatan ini. Karena itu Korten mulai bicara tentang generasi keempat.

3. Organisasi non-pemerintah generasi keempat dengan demikian berbicara tentang konsep, atau ideologi, atau strategi alternatif pembangunan. Inilah yang dimaksud Korten sebagai transformasi pembangunan. Intinya pembangunan harus mengutamakan rakyat. Disini seperti yang sudah di bicarakan diatas dibicarakan masalah-masalah kemiskinan, masalah lingkungan hidup, dan masalah partisipasi rakyat. Masalah ini tidak lagi berskala lokal atau nasional, tapi global.<sup>9</sup>

Menurut David C Korten istilah LSM meliputi 1. Organisasi Sukarela (OS) yang melakukan misi sosial, terdorong oleh suatu komitmen kepada nilai-nilai yang samaa. 2. Kontraktor pelayanan umum (KPU) yang berfungsi sebagai usaha tanpa laba berorientasi pasar untuk melayani kepentingan umum. 3. Organisasi rakyat (OR) yang mewakili kepentingan anggotanya mempunyai pimpinan yang bertanggung jawab terhadap anggota, dan cukup mandiri. 4. Lembaga Swadaya

---

<sup>9</sup> David Korten, *Third Generation NGO Strategies: Akey to people Centered Development, World Development* 15, Tambahan ( Musim Gusur tahun 1987), hlm. 145-159.

Masyarakat Pemerintah (LSMP) dibentuk oleh pemerintah dan berfungsi sebagai alat kebijakan pemerintah.<sup>10</sup>

Selama tahun 1980-an banyak LSM menyadari bahwa pemerintah tidak bisa di harapkan untuk mengatasi masalah-masalaah pokok yang dihadapi negara negara miskin di kawasan selatan. Pemerintah di mana saja dan badan-badan Internasional kini mengakui kemampuan LSM untuk melakukan apa yang sudah terbukti tidak bisa dilakukan banyak pemerintahan, yaitu menyampaikan sejumlah makanan dan pelayanan pokok kepada Golongan miskin.<sup>11</sup> Jika kita mengacu pada tulisan Korten diatas maka kita dapat mengidentifikasi The Asia Foundation sebagai kelompok LSM generasi ke-empat dimana bantuan yang di berikan kepada rakyat tidak semata-mata bantuan pokok namun organisasi ini juga menginginkan kemajuan masyarakat sipil secara menyeluruh. Hal tersebut di realisasikan dalam bentuk, pemberdayaan perempuan dan pengentasan kemiskinan yang telah di lakukanya di beberapa daerah di Indonesia.

## **2. Konsep Demokrasi Gelombang Ketiga**

Dalam konsep ini Samuel Huntington menjelaskan bahwa penyebaran Demokrasi gelombang ketiga diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu antara lain melemahnya legitimasi rejim otoriter, perkembangan di sektor ekonomi, dampak

---

<sup>10</sup> David Corten Tindakan Sukarela dan agenda global . Yayasan Obor Indonesia Dan Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1993. Hlm. Kata pengantar *xix*.

<sup>11</sup> Ibid . hlm. 10.

dari proses serupa di kawasan (*snowball effect*), dan tekanan dari luar. Bersamaan dengan runtuhnya Uni-Soviet maka ada perubahan kepentingan Amerika Serikat, negara adidaya ini merasa tak perlu lagi memberikan dukungannya kepada rezim otoriter guna menghalau perkembangan Komunisme.<sup>12</sup> Hal ini juga terjadi di Indonesia dimana rezim Orde Baru pada saat itu melemah dan runtuh karena absenya dukungan dari Amerika. Peran The Asia foundation pada saat itu adalah sebagai sebuah organisasi non-pemerintah yang ingin menyebarkan gagasan demokrasi pasca lengsernya Soeharto. Sebagai LSM asing yang ingin menyebarkan sebuah gagasan demokrasi maka The Asia Foundation merasa perlu untuk menjalin hubungan baik dengan nilai-nilai setempat, hal tersebut di wujudkannya dengan memberikan bantuan maupun pelatihan kepada lembaga-lembaga mitranya di Indonesia.

### **3. Konsep Konsolidasi Demokrasi**

Samuel Huntington dalam studinya tentang “gelombang demokratisasi ketiga 3 menggambarkan bahwa demokratisasi pada tingkatan yang paling sederhana mensyaratkan terjadinya tiga hal, yaitu 1 berakhirnya sebuah rezim otoriter 2 dibangunnya sebuah rezim demokratis 3 pengkonsolidasian rezim

---

<sup>12</sup> *Malaysia-dan-demokratisasi-gelombang-ketiga* (Diakses pada hari Jum'at Tanggal 6-November-2009) tersedia di: <http://kolumnis.com/2008/03/26/>

demokratis itu.<sup>13</sup> Dengan demikian, demokratisasi memiliki dua tahap, yaitu transisi demokrasi dan konsolidasi demokrasi. Transisi adalah masa antara dua rezim politik. Transisi demokrasi dimulai sejak bergulirnya proses desolusi (tumbangnya) sebuah rezim otoriter pada ujung yang satu dan ditegakkannya rezim demokrasi pada ujung yang lainnya.<sup>14</sup>

Pada tahapan ini penekanan ada pada penegakan demokrasi secara procedural yakni berfungsinya berbagai institusi-institusi politik secara demokratis. Dengan definisi ini proses transisi demokrasi di Indonesia berlangsung pada masa Presiden Habibie. Pada akhir masa Habibie proses transisi tersebut boleh dikatakan telah tuntas.<sup>15</sup>

Namun untuk benar-benar menjadi negara demokrasi, haruslah dilalui tahap konsolidasi yang menurut berbagai literatur merupakan konsep yang tidak kalah sulitnya dibanding proses transisi. Bahkan banyak negara yang jatuh kembali ke rezim otoriter karena gagal menyelesaikan proses konsolidasi demokrasi.<sup>16</sup> Konsolidasi demokrasi berarti bahwa demokrasi bukan hanya telah tegak sebagai sebuah sistem politik tetapi juga telah membudaya di kalangan

---

<sup>13</sup> Samuel P. Huntington, 1995, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, (Jakarta : Grafiti).

<sup>14</sup> Baca O'Donnell, Guillermo, and Phillippe C. Schmitter. *Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies*. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press. 1986.

<sup>15</sup> Prof.Dr. Ginandjar Kartasmita 'Strategi Pembangunan Ekonomi Antara Pertumbuhan dan Demokrasi 'hal. 3

<sup>16</sup> Samuel P. Huntington, Loc. Cit

masyarakat. Bahkan betapapun besarnya tantangan dan kesulitan yang dihadapi masyarakat tidak akan berpaling dari demokrasi ke sistem politik lain.<sup>17</sup>

Tahap konsolidasi menghendaki perhatian pada segi-segi substantif. Karena di benak kebanyakan rakyat yang telah lama mengalami penindasan, ketidakadilan dan kemiskinan, demokrasi melambangkan lebih dari sekadar penghapusan institusi-institusi politik yang represif dan penggantian pemimpin-pemimpin otoriter. Demokrasi merepresentasikan kesempatan dan sumberdaya bagi perbaikan kualitas hidup serta bagi kehidupan sosial yang lebih adil dan manusiawi. Oleh karena itu, konsolidasi demokrasi harus menjamin terwujudnya esensi demokrasi: pemberdayaan rakyat *popular empowerment* dan pertanggung jawaban sistemik *systemic responsiveness*.<sup>18</sup>

#### **E. Hipotesis:**

Berdasarkan latar belakang dan melihat rumusan masalah diatas dan dengan menggunakan pendekatan teoritik serta kerangka konseptual maka di kemukakan bahwa The Asia Foundation memiliki peran dalam Demokratisasi di Indonesia dalam bentuk pertama, melalui program pengembangan masyarakat sipil seperti program pemberdayaan perempuan dan program penguatan ekonomi.

---

<sup>17</sup> Prof.Dr. Ginandjar Kartasasmita, op.cit. h. 4

<sup>18</sup> Prof.Dr. Ginandjar Kartasasmita, loc. Cit.

Kedua, melalui pengenalan gagasan *civic values* dan konsep demokrasi melalui pendidikan maupun bantuan terhadap lembaga-lembaga mitranya di Indonesia.

### **F. Metode penellitian**

Dalam tulisan ini digunakan metode deskriptif yaitu dengan menguraikan data-data yang diperoleh sehingga dapat membuktikan kebenaran hipotesanya. Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yaitu melalui studi pustaka dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, seperti buku-buku, literatur-literatur, artikel baik koran maupun internet, dan sumber lain yang dianggap relevan.

### **G. Sistematika Penulisan**

BAB I : Pada bab ini akan di uraikan dan dijelaskan bagian yang menjadi dasar dan pendahuluan dalam penulisan skripsi ini yaitu, alasan pemelihan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran.

BAB II: Bab ini penulis akan menguraikan pembahasan mengenai sejarah The Asia Foundation dan proses terbentuknya di Indonesia.

BAB III: Pada bab ini akan di uraikan bagaimana peran Asia Foundation dalam menyebarkan demokrasi melalui program pengembangan masyarakat sipil seperti penguatan ekonomi dan program pemberdayaan perempuan.

BAB IV: Pada bab ini akan di uraikan bagaimana peran The Asia Foundation dalam penyebaran demokrasi melalui pendidikan dan penerapan community policing dalam kepolisian Indonesia.

BAB V: Pada bab V ini berisi kesimpulan dan analisa dari bab- bab sebelumnya.